

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mengatasi kejahatan di masyarakat secara langsung, dimana harus memenuhi nilai-nilai keadilan serta memiliki manfaat dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi suatu kejahatan yang terjadi dimasyarakat terdapat berbagai cara untuk memberikan reaksi kepada pelaku kejahatan, itu bisa dari sudut pidana maupun non pidana. Jika sarana yang digunakan dari sisi pidana maka bisa dilakukan sebuah politik hukum pidana guna untuk mencapai aturan perundang-undang dengan melihat pada fakta yang terjadi di masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum memiliki manfaat untuk dijaminnya sebuah kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban di masyarakat. Penegakan hukum sendiri bisa diartikan ke dalam 3 konsep yaitu :

- a. Penegakan hukum yang bersifat menyeluruh. Dimana segala norma yang ada dalam sebuah aturan hukum agar ditegakan tanpa terkecuali.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

- b. Penegakan hukum yang bersifat penuh. Dimana dalam hal ini dibatasi oleh aturan yang ada dalam hukum acara guna terlindungnya kepentingan dari orang yang menjadi sasaran dalam aturan hukum.
- c. Penegakan hukum yang bersifat actual. Dimana dalam hal ini dibolehkannya untuk melakukan kebijakan dalam melaksanakan sebuah penegakan karena kurangnya sarana atau prasarana, aturanc hukum dan kualitas sumber daya didalamnya.¹⁸

Menurut Liliana Tedjosaputro penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Selain itu ada pula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.¹⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaiman

¹⁸ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

¹⁹ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, hlm. 60

hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut law enforcement, dalam Bahasa Belanda disebut rechtshandhaving. Handhaving menurut Notitle Handhaving Milieurecht 1981 adalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan berlaku umum dan individual

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Jika melihat dari tolak ukur dalam mengukur efektifitas dalam penegakan hukum sendiri menurut pendapat dari **Soerjono Soekanto** ialah ada beberapa faktor diantaranya²⁰:

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan , kepastian dan kemanfaatan. Seperti halnya dalam sebuah praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak Yang pada akhirnya jika hakim dalam hal ini memutuskan perkara berdasarkan hanya sebatas undang-undang maka disitu ada kiranya nilai keadilan tidak tercapai. Karena

²⁰ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

apa yang dianggap sebagai hukum tidak sebatas aturan-aturang yang tertulis pada dasarnya saja.

2) Faktor Penegakan

Dalam pelaksanaan sebuah aturan hukum ada para aparat penegak hukum yang memiliki perannya masing-masing dalam sebuah penegakan hukum, dimana para aparat penegak hukum disini memiliki posisi vital, jika disini para aparat penegak hukum bertindak tidak sesuai apa yang seharusnya. Disinilah kadang yang menjadi sorotan dimasyarakat karena tidak jarang dari aparat penegak hukum yang bertindak diluar batas ataupun tidak sesuai dengan seharusnya hal ini berhubungan dengan kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum harus didukung oleh fasilitas dan sarana, dalam hal ini fasilitas dan sarana tersebut yang dapat menunjang kinerja dari penegak hukum itu sendiri yaitu baik dari sistem perangkat lunak dan sistem perangkat keras yang mana dapat menunjang kinerja dari para penegak hukum itu sesuai kebutuhannya masing-masing.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat disini merupakan sasaran dari sebuah aturan hukum maka harus dilihat dari segi kepatuhan hukum dimasyarakat seperti apa, jika masyarakat disini masih dirasa memiliki kesadaran atau kepatuhan hukum yang masih rendah maka harus di dorong dengan peran dari para penegak hukum untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait aturan hukum yang mejadi sasaran di masyarakat tersebut, dengan kata lain perlu adanya Pendidikan informal disini dari penegak hukum demi tercapainya tujuan hukum dimasyarakat nantinya.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dimana hal tersbut merupakan nahan dari dirumuskannya sebuah aturan hukum, maka dari nilai-nilai yang terkadnung dimasyarakat tersebut harus disesuaikan dengan atruan yang akan dirumsukan nantinya..²¹

Dalam mengukur efektifitas dari sebuah penegakan hukum ke lima fator diatas saling berkaitan guna untuk dapat dikatakanya sudah efektif sebuah penegakan hukum itu sendiri, ke lima faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya karena merupakan serangkaian dari aktifitas dari sebuah penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan baik dari sisi peraturan undang-undangnya, maupun penegakannya disusun serta dilaksanakan oleh para penegak hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

²¹ *Ibid.* Hal. 85

1. Tindak Pidana

Merujuk Kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan (KBBI), Pengertian Tindak Pidana adalah suatu langkah yang atau perbuatan sedangkan Pengertian Pidana ialah kejahatan tentang Pembunuhan, Perampokan, Korupsi dan sebagainya jadi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut ialah suatu Tindak Pidana merupakan suatu langkah untuk membuat suatu kejahatan seperti Pembunuhan, Perampokan, Korupsi dan hal lainnya.²²

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diistilahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³ Biasanya tindak pidana disama artikan dengan delik, delik berasal dari bahasa

²² Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka. Hal. 276

²³ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.69

latin yakni *delictum* ²⁴. Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang ²⁵.

Dalam kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum ²⁶. Dalam hukum pidana belanda selain memakai istilah *strafbaatfeit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaarfeit*. Prof. Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya ²⁷. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap.

2. Tindak Pidana dalam pandangan Pandangan Monistis dan Dualistis

Dalam pengertianya Pandangaen monistis ialah hal pandangaen yang menentukan keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu

²⁴ Sadatinus Putera Pratama, 2013, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Malang: Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 15

²⁵ Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka. Hal. 276

²⁶ Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 144.

²⁷ Leiden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, Hal.4.

semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah termasuk didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan suatu pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*Criminal responsibility*). Suatu Pandangan tersebut ini tidak membedakan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orang. Terdapat beberapa batasan atau pengertian tindak pidana dari ahli hukum yang menganut pandangan Monistis. Contohnya adalah Simons. Simons berpendapat Tindak Pidana ialah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dari orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang dari UU telah dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Maka dengan batasan tersebut, Simons berpendapat, adanya suatu tindak pidana wajib hukumnya untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) dilakukan sama kesalahan
- 5) berbuat mampu bertanggungjawab .

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya semua syarat untuk adanya sebuah pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act*

dan Criminal responsibility .²⁸ Jika diikuti pendapat ini, maka apabila adanya seseorang yang melakukan pembunuhan yang terdapat dalam ketentuan ps. 338 KUHP tetapi kemudian ternyata orang yang melakukan pembunuhan itu adalah seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya oleh karena orang gila maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana .Secara mudah bisa dijelaskan mengapa peristiwa itu tidak dapat disebut tindak pidana , sebab unsur -unsur tindak pidananya tidak terpenuhi , yaitu unsur orang yang mampu bertanggung jawab . Maka dari itu tidak ada tindak pidana , maka juga tidak ada pidana .

Sedangkan dalam pandangan dualistis dijelaskan bahwa adanya memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya.Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja.Sedangkan pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur sebuah tindak pidana. Seperti halnya dalam pandangan dualistis , untuk melihat adanya sebuah pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana , tetapi

²⁸Tongat. 2011. *Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang . Hlm . 94

dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana .

Moeljatno dalam bukunya juga menyatakan bahwa untuk adanya tindak pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana , tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak . Jadi peristiwanya adalah tindak pidana , tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar -benar dipidana atau tidak , akan dilihat bagaimana keadaan batiniah orang itu dan bagaimana hubungan batiniah antara suatu perbuatan yang terjadi dengan seseorang itu . Jika suatu perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu , yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu , maka orang itu dapat dijatuhi pidana , demikian sebaliknya .²⁹ Perbedaan yang membedakan dua pandangan diatas ialah jika dalam suatu pandangan monistis kesemuaan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility* . Sementara dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana , oleh karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* mencakup *criminal responsibility* .

²⁹*Ibid.* Hlm. 96

Jadi Ada suatu pemisahan antara perbuatan pidana dengan orang yang melakukan perbuatan pidana itu .

1. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan negara indonesia yang berlaku, berupa :³⁰

- a. Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan, Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia
- b. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia ,
- c. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam UU tentang keimigrasian adalah tindakan administrasi dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Sedangkan jika warga negara asing tersebut terbukti melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam UU

³⁰Dr.M.Iman Santoso, *"Perspektif Imigrasi"*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia,2007 hal 10.

Keimigrasian Maka harus diproses secara Pengadilan dengan ketentuan hukum yang tetap (*incraht*). Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.³¹

C. Tinjauan Umum Keimigrasian

1. Imigrasi

Pengertian Imigrasi berasal dari kata „migraten“ atau kata benda “migrations”(bahasa inggris) , yang berarti “go from one country or place of residence to settle in another” (the new webster handy college dictionary ,). Jadi pengertian imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal menuju tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.³² Walaupun pada awalnya kata imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai makna yang lebih luas. Jika merujuk kepada pada lalu lintas orang antar wilayah negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi

³¹Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya ”,PT.Tamita Utama Jakarta 2012,hal 122

yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

1. Pengertian WNA

Merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang -undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

WNA berkunjung menuju wilayah negara Indonesia mempunyai suatu hak saat berada di wilayah Negara Indonesia . Kunjungan WNA dan jika mereka menetap tidak selamanya di Wilayah Negara Indonesia , WNA tersebut memiliki hak keperdataan di dalam perundang-undangan. Hak Keperdataan yang dimiliki ialah WNA mempunyai sebuah hak untuk melakukan transaksi jual maupun beli suatu barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Disamping WNA mempunyai hak Keperdataan untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih WNI sebagai pasangannya suami siteri. Selanjutnya dengan perkawinan itu mempunyai hak keperdataan untuk mendapatkan WNI.

Ketika berada di wilayah Negara Indonesia WNA bisa melakukan kegiatan usaha atau bisnis guna dilihat dapat menguntungkan dirinya. UU di Wilayah Negara Indonesia tidak menutup WNA untuk mencoba untuk berbisnis. Kepada suatu perusahaan yang berbadan hukum asing peraturan Perundang-Undangan mengatur untuk tidak banyak Perusahaan Asing yang

memiliki kesempatan untuk berbisnis di Wilayah Negara Indonesia , keadaan ini diciptakan karena agar negara republic Indonesia melindungi perusahaan local atau nasional. Walaupun hal tersebut terdapat sesuatu bidang tertentu yang mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan asing melakukan suatu kegiatan, yakni kegiatan bisnis. Bidang yang dimaksud ialah pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri . Lain halnya juga seperti di bidang perbankan perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di wilayah Negara Indonesia .³³

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

Sedangkan Kewenangan PPNS Imigrasi diatur dalam Pasal 106

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;

³³ Jazim Hamidin dan Charlese Christian.(et.al.) *Op.cit.* Hal. 106

- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum

D. Tinjauan Umum tentang Visa

1. Pengertian Visa

Pengertian Visa menurut etimologi katanya berasal dari bahasa Latin yakni *carta visa* yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut : *from Modern Latin charta visas 'verified paper' , literally 'paper that has been seen' , past participles of Latino videre 'to see'.*³⁴

Bersasarkan UU tentang Keimigrasian Visa ialah, Suatu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi WNA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal WNA tersebut.³⁵ Beragam definisi mengenai visa yang dapat kita peroleh di dalam Bahasa asing, pada umumnya mereka telah terlebih dahulu

³⁴ Law Dictionary, <http://dictionary.com/reference/browse/visa> diakses pada 25 Nopember 2018

³⁵ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

mengenal dan menerapkan penggunaan visa dalam lalu-lintas antar negara mereka.

2. Visa di Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, terdapat 4 jenis visa yakni :

1. Diplomatik
2. Dinas
3. Kunjungan
4. Tinggal Terbatas

Selanjutnya untuk menjelaskan beberapa Visa, maka Penulis akan menjelaskan sebagaimana berikut :

1) Diplomatik

Adalah Visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Negara Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.³⁶

2) Dinas

Adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Negara Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat

³⁶ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

diplomati dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.³⁷

3) Kunjungan

Adalah Visa yang digunakan untuk tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 hari, seperti kunjungan untuk :

- a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Indonesia;
- b. Berwisata atau Liburan;
- c. Keluarga atau sosial;
- d. Pendidikan;
- e. Dating untuk Mengikuti pelatihan singkat;
- f. Jurnalistic yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang;
- g. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan dari instansi yang berwenang;
- h. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
- i. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
- j. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersil;
- k. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Negara Indonesia.³⁸

4) Tinggal Terbatas

Adalah Visa ini digunakan untuk bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja.

³⁷ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁸ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

E. Sanksi Penyalahgunaan Visa

1. Sanksi Administratif

Adalah sebuah Tindakan Pejabat Imigrasi terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Negara Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa:³⁹

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan Orang Asing;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Negara Indonesia;
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Negara Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Negara Indonesia.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana Keimigrasian atau biasa yang disebut *Pro Justicia* adalah sebuah tindakan yang berupa penegakan sanksi dengan caraputusan pengadilan negeri yang tetap. *Pro justicia* menurut sebuah kamus hukum mempunyai arti untuk /demi hukum atau UU Jadi hal ini sanksi

³⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian .(et.al.) *Op.cit.* Hal. 91

pidana keimigrasian terdapat beberapa tahap penyelesaian perkara yaitu

.⁴⁰

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan dalam Ps.

122 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian butir a menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)”.



⁴⁰ Rurio Kemalayu Desrianie, 2015. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 7

